

Socialization for Violence Prevention in Educational Institutions and Communities: A Psychoeducational and Legal Awareness Approach

Maulida Aulia Rahman^{1*}, Jamilah², Muhamad Rizky Nurohman³, Nazma Rahma Aullia⁴.
¹²³⁴Institut Pendidikan Indonesia Garut

*Penulis koresponden e-mail: maulida@institutpendidikan.ac.id

Abstract

This article reports a multi-setting community outreach on violence prevention across higher education, Islamic boarding school and vocational school, secondary schools, and a village community in Garut, Indonesia. The program aimed to strengthen psychoeducational understanding and legal awareness regarding child protection and reporting pathways. Using a descriptive, participatory design, activities combined interactive lectures, case-based discussions, role-play, and storytelling; data consisted of observations, field notes, and participant testimonies. Findings indicate that participants could identify types of violence, demonstrated improved legal literacy and readiness to report, and practiced protective skills such as assertive refusal, help-seeking, and basic documentation. The outreach produced an adaptive, replicable socialization model suitable for diverse age groups and settings. The study concludes by recommending curricular integration, clear institutional SOPs, and visible referral maps to sustain safer learning environments.

Keyword: Violence prevention; Psychoeducation; Legal awareness

Abstrak

Artikel ini melaporkan pengabdian masyarakat lintas-setting mengenai pencegahan kekerasan pada perguruan tinggi, pesantren dan SMK, sekolah menengah, serta komunitas desa di Garut, Indonesia. Tujuannya memperkuat pemahaman psikoedukatif dan literasi hukum terkait perlindungan anak serta jalur pelaporan. Metode menggunakan desain deskriptif partisipatif melalui kuliah interaktif, diskusi berbasis kasus, role-play, dan cerita; data berupa observasi, catatan lapangan, dan testimoni peserta. Hasil menunjukkan peserta mampu mengidentifikasi jenis kekerasan, meningkatkan literasi hukum dan kesiapan melapor, serta melatih keterampilan protektif seperti penolakan asertif, meminta bantuan, dan dokumentasi awal. Kegiatan menghasilkan model sosialisasi adaptif yang dapat direplikasi pada beragam usia dan konteks. Disimpulkan perlunya integrasi ke kurikulum, SOP institusional yang jelas, serta peta rujukan yang kasatmata

Article Info:

Received 12 September 2025

Received in revised 4 Oktober 2025

Accepted 15 September 2025

Available online 11 November 2025

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v6i4.1125>



[Indonesian Journal of Community Empowerment \(IJCE\)](#) is published under licensed of a CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v6i4.1125>

untuk menopang ekosistem belajar yang aman.

Kata Kunci: Pencegahan kekerasan; Psikoedukasi; Kesadaran hukum

I. PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan pendidikan dan komunitas merupakan persoalan serius yang terus menjadi perhatian global maupun nasional. Fenomena ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) yang tidak jarang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak dan remaja. Lembaga pendidikan, termasuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi, sejatinya berfungsi sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang peserta didik, namun pada kenyataannya juga berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan akibat lemahnya mekanisme pencegahan dan rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini semakin kompleks akibat masih kuatnya budaya diam, rendahnya literasi tentang hak perlindungan anak, dan belum meratanya penerapan kebijakan anti-kekerasan di berbagai satuan pendidikan. Data KemenPPPA melalui SIMFONI-PPA tahun 2024 mencatat jumlah korban kekerasan anak di lingkungan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut [1].

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan menurut Jenjang

Jenjang pendidikan	Jumlah korban (orang)	Penjelasan
PAUD	19	Kekerasan terhadap anak usia dini umumnya terjadi di lembaga PAUD dan jarang dilaporkan.
SD	235	Kasus yang dilaporkan mencakup perundungan, kekerasan fisik dan pelecehan.
SMP	299	Anak usia SMP (12-14 tahun) tercatat mengalami kekerasan fisik maupun psikis.
SMA/SMK	342	Remaja SMA/SMK merupakan kelompok dengan jumlah korban paling tinggi.
Perguruan tinggi	94	Kasus ini melibatkan mahasiswa di perguruan tinggi serta beberapa pondok pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan.

(Sumber: SIMFONI-PPA, 2024)

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Garut, di mana beberapa lembaga pendidikan dan masyarakat menghadapi persoalan serupa. Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, sebagai salah satu perguruan tinggi yang aktif di bidang pendidikan dan memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Namun, komitmen kelembagaan ini perlu diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan sivitas akademika agar nilai-nilai perlindungan dan kesetaraan benar-benar terinternalisasi dalam budaya kampus.

Di luar lingkungan perguruan tinggi, permasalahan serupa juga terjadi di masyarakat sekitar. Desa Pasirwangi, misalnya, tengah menghadapi keprihatinan sosial akibat kasus tragis seorang remaja yang meninggal bunuh diri setelah mengalami perundungan berkepanjangan. Kasus ini menggambarkan betapa lemahnya sistem deteksi dini dan



dukungan psikososial bagi korban kekerasan di tingkat komunitas serta minimnya literasi masyarakat dalam menangani dampak psikologis kekerasan pada anak dan remaja.

Selain itu, Yayasan Pendidikan dan Pesantren Assalam Samarang Garut sebagai mitra kegiatan juga menunjukkan kebutuhan nyata akan program penguatan kapasitas dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, namun juga rentan terhadap kekerasan verbal, fisik, maupun seksual jika tidak dibarengi dengan kebijakan internal dan kesadaran hukum yang kuat. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pesantren ramah anak dan sekolah aman tanpa kekerasan, sejalan dengan visi nasional “Satuan Pendidikan Aman, Ramah, dan Menyenangkan.”

Upaya pencegahan kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran faktor psikologis, hukum, dan sosial yang saling terkait [2]. Dari sisi psikologis, penelitian menegaskan bahwa iklim sekolah dan kualitas hubungan antara guru dengan siswa berkontribusi signifikan terhadap terciptanya suasana belajar yang kondusif serta menekan potensi terjadinya kekerasan [3]. Sementara dari aspek hukum, keberadaan regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual maupun mekanisme pengaduan internal menjadi hal yang fundamental, meskipun dalam praktiknya sering kali masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi [4], [5]. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat, keluarga, dan komunitas lokal juga sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan, karena hanya dengan sinergi bersama berbagai pihak upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik, guru, santri, mahasiswa, dan masyarakat tentang jenis-jenis kekerasan yang mungkin mereka alami; bagaimana cara menumbuhkan kesadaran hukum mereka sehingga memahami hak perlindungan anak dan mekanisme pelaporan yang dapat diakses; bagaimana melatih keterampilan protektif agar peserta lebih siap menghadapi dan mencegah kekerasan; serta bagaimana merumuskan model sosialisasi yang adaptif dan dapat direplikasi di berbagai setting pendidikan maupun komunitas. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program pengabdian ini.

Motivasi utama kegiatan sosialisasi adalah menghadirkan intervensi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif [6]. Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan, meningkatkan literasi hukum peserta terkait hak perlindungan anak serta jalur pelaporan, sekaligus melatih keterampilan protektif melalui pendekatan psikoedukatif yang sesuai dengan usia dan konteks peserta. Lebih jauh, kegiatan ini juga diarahkan untuk menghasilkan model sosialisasi pencegahan kekerasan yang adaptif sehingga dapat direplikasi oleh lembaga pendidikan lain maupun komunitas yang menghadapi tantangan serupa.

Dengan demikian, tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas peserta didik dan komunitas pendidikan dalam menghadapi tantangan kekerasan dengan menggabungkan dimensi psikologis, hukum, dan sosial secara integratif. Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, sekaligus memberi kontribusi nyata dalam membangun budaya anti-kekerasan di masyarakat.

II. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan partisipatif, di mana tim pelaksana berperan aktif bersama peserta dalam proses sosialisasi.



Desain kegiatan berfokus pada penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi sederhana yang relevan dengan konteks peserta. Kegiatan dilaksanakan di empat lokasi berbeda, yaitu Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Yayasan Pendidikan Islam Assalam Samarang Desa Cintaasih Kecamatan Samarang, Yayasan Pendidikan Islam Annida Pasirmukti, serta Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi. Sumber data utama berasal dari peserta kegiatan yang terdiri atas mahasiswa, santri, siswa SD, SMP, SMA, guru, serta masyarakat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap jalannya kegiatan, pencatatan respon peserta selama sosialisasi, serta pengumpulan testimoni dan refleksi peserta di akhir kegiatan. Observasi digunakan untuk melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta, sedangkan testimoni digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman mereka setelah mengikuti sosialisasi. Dokumentasi berupa foto, catatan kegiatan, dan hasil diskusi kelompok juga dijadikan data pendukung untuk memperkaya deskripsi hasil pengabdian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara mereduksi informasi yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, dan testimoni peserta, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi yang menggambarkan capaian kegiatan. Variabel utama yang diamati adalah peningkatan pemahaman peserta tentang jenis-jenis kekerasan, penguatan literasi hukum mengenai hak perlindungan anak dan mekanisme pelaporan, serta pengembangan keterampilan protektif peserta dalam menghadapi potensi kekerasan. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk menyusun model sosialisasi yang adaptif dan dapat direplikasi pada lembaga pendidikan maupun komunitas lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan lintas-*setting* menunjukkan respons yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masing-masing konteks. Sosialisasi yang dilakukan di tingkat Pendidikan Tinggi yaitu Institut Pendidikan Indonesia, *audiens* didominasi mahasiswa dan dosen menunjukkan antusiasme tinggi pada diskusi seputar mekanisme hukum, alur pelaporan, serta peran sebagai agen pencegah kekerasan di lingkungan kampus. Diskusi mengerucut pada bagaimana dosen dan mahasiswa calon guru dapat mengintegrasikan literasi hukum dalam pembelajaran serta advokasi berbasis kampus.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPKPT IPI Garut, 2025



Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan di Yayasan Pendidikan Islam Assalam Samarang yang membawahi pesantren dan SMKS Assalam diarahkan untuk menyiapkan komunitas sekolah yang ramah, aman, nyaman, dan menggembirakan. Sesi dibuka dengan penyelarasan nilai dan harapan bersama antara pengurus pesantren, guru SMKS, dan peserta, lalu dilanjutkan *case-based discussion* yang membuat santri dan siswa lebih terbuka membagikan pengalaman, termasuk dinamika relasi kuasa yang kerap tidak terlihat. Keterbukaan ini memudahkan fasilitator memetakan area rawan dan menegaskan langkah protektif, seperti cara menolak secara asertif, mengidentifikasi orang dewasa tepercaya, serta mengakses layanan bantuan. Dari proses ini, peserta bersama fasilitator menyusun rancangan langkah awal berupa komitmen kelas/pondok anti-kekerasan dan etika interaksi, penayangan alur bantuan dan kontak rujukan di area strategis sekolah/pondok, latihan respons asertif sederhana yang dapat diulang mandiri, serta rencana sosialisasi berjenjang oleh guru dan wali asrama agar pesan pencegahan terintegrasi dalam rutinitas sekolah dan kehidupan pondok.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di SMKS Assalam Kecamatan Samarang

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian, 2025

Kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas di Kantor Desa Padaasih, Kecamatan Pasirwangi, 9 Agustus 2025, yang menghimpun 50 peserta: perwakilan siswa SDN Padaasih, guru, santri Nurul Huda Malati, serta orang tua dan masyarakat. Sesi dibuka dengan cerita edukatif yang disampaikan lewat bahasa sederhana dan contoh kontekstual. Metode ini efektif membantu siswa SD menamai kejadian yang dekat dengan keseharian ejekan fisik, dorongan di halaman sekolah, hingga bentuk perundungan siber paling dasar sekaligus melatih tiga langkah praktis: mengenali rasa tidak nyaman, mengatakan “tidak” secara tegas, dan segera mencari orang dewasa tepercaya. Lalu *talkshow* tanya jawab dengan orang tua dan guru yang dipandu bersama santri, membahas perbedaan disiplin dan kekerasan, tanda-tanda anak sedang tertekan, serta panduan jalur pelaporan setempat yang realistis dari wali kelas dan guru BK/asrama hingga layanan perlindungan anak, fasilitas kesehatan, dan aparat. Orang tua dan guru menyepakati peta kontak rujukan yang mudah diakses serta komitmen komunikasi dua arah di kelas dan lingkungan rumah, sehingga pesan pencegahan terjembatani antara sekolah, pesantren, dan keluarga.





Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Desa Padaasih, Kecamatan Pasirwangi

. Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian, 2025

Di Yayasan Pendidikan Islam Annida Padamukti Pasirwangi, siswa SMA dan MA menunjukkan sikap kritis dalam mengenali bentuk kekerasan verbal, gaslighting, dan relasi kuasa antar-sebaya maupun dengan otoritas; sesi *role-play* membantu mereka mempraktikkan respon asertif dan membuat rencana dukungan teman sebaya (*peer support*). Sementara itu, pada Desa Padaasih Pasirwangi, metode cerita, permainan edukatif, dan kartu-kartu situasi membuat anak SD dapat menyebutkan contoh kekerasan sederhana yang dekat dengan keseharian (misal ejekan fisik/kelamin, dorongan, dan perundungan siber dasar), sedangkan guru dan orang tua memperoleh penguatan literasi hukum perlindungan anak serta panduan praktis jalur pelaporan setempat.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di SMK MA Pondok Pesantren Annida Padamukti, Kecamatan Pasirwangi

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian, 2025

Dari keseluruhan rangkaian, isi sosialisasi yang memadukan empat komponen pemberian pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan [7]; peningkatan literasi hukum terkait hak perlindungan anak dan mekanisme pelaporan [8]; pelatihan keterampilan protektif (penolakan asertif, meminta bantuan, dokumentasi awal) [9]; dan penyusunan model sosialisasi adaptif terbukti dapat ditangkap *audiens* dengan baik ketika disesuaikan dengan karakter peserta [9]. Pada tataran observasi, terlihat indikasi peningkatan responsivitas pemahaman di semua lokasi: jumlah pertanyaan meningkat, peserta mampu mengulang kembali jalur pelaporan, dan semakin banyak contoh kasus keseharian yang berhasil diidentifikasi beserta respon yang



tepat. Pola temuan ini menguatkan literatur bahwa edukasi damai/peace education di lembaga pendidikan efektif sebagai langkah preventif [10]. Kebaruan program terletak pada model multi-setting yang lentur: pendekatan literasi hukum lebih efektif untuk mahasiswa/dosen; psikoedukasi berbasis kasus membuat santri lebih responsif; analisis relasi kuasa dan latihan asertivitas pas bagi siswa SMA; sedangkan anak SD memerlukan cerita & permainan edukatif. Hasil ini juga sejalan dengan Safitri dkk. [11] yang menunjukkan literasi hukum meningkatkan keberanian pelaporan, sekaligus memperluas temuan Eviningrum [12] tentang urgensi satuan pendidikan ramah anak dengan menambahkan dimensi adaptasi lintas-konteks.

Tabel 2. Rangkaian Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Tanggal	Lokasi	Peserta	Jumlah	Bentuk Kegiatan Utama
7 Mei 2025	IPI Garut	Mahasiswa dan dosen	150	Kuliah umum interaktif, studi kasus kebijakan, tanya-jawab terarah
18 Juli 2025	Yayasan Pendidikan Islam Assalam Samarang	Siswa SMK, santri, guru	80	Diskusi kasus nyata, psikoedukasi, latihan respon asertif
9 Agustus 2025	Kantor Desa Padaasih, Kec. Pasirwangi	Perwakilan siswa SDN Padaasih, guru, santri Nurul Huda Malati, orang tua/masyarakat	50	Cerita edukatif, permainan peran sederhana, talkshow orang tua–guru
12 Agustus 2025	Yayasan Pendidikan Islam Annida Padamukti, Pasirwangi	Siswa MAS Annida dan SMKS Annida	80	Workshop analisis relasi kuasa, role-play asertivitas, diskusi kelompok

Sumber: Kegiatan Pengabdian (2025)

Temuan lapangan dari empat lokasi pengabdian memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan akan efektif ketika intervensi memadukan psikoedukasi, literasi hukum, dan pelibatan komunitas, serta disesuaikan dengan karakter peserta dan kultur lembaga. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa iklim institusi dan kualitas relasi pedagogis merupakan fondasi kelas yang aman; kompetensi sosial-emosional pendidik dan mutu hubungan guru–peserta didik berkontribusi langsung pada berkurangnya perilaku kekerasan [3]. Di IPI Garut, fokus diskusi mengerucut pada peran pendidik sebagai penjaga gerbang pencegahan: mahasiswa calon guru dan dosen bukan hanya mendalami konsep, tetapi memetakan praktik manajemen kelas berempati dan komunikasi yang menumbuhkan rasa aman. Di MAS dan SMKS Annida Padamukti, tema-tema relasi kuasa dan kekerasan verbal yang kerap



“dinormalisasi” diurai bersama, lalu dialihbahasakan ke latihan asertivitas dan perumusan kode etik kelas. Dengan demikian, penguatan iklim institusi tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi mengalir ke keterampilan sosial yang dapat dipraktikkan sehari-hari melalui integrasi pendidikan sosial-emosional dan resolusi konflik, meski sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika emosional orang tua [3].

Pembahasan

Dimensi kebijakan dan hukum menempati posisi krusial karena memberi rambu operasional bagi pencegahan, pelaporan, hingga penanganan [13][8]. Kajian menunjukkan perlunya strategi komprehensif di kampus dan satuan pendidikan keagamaan yang meliputi kebijakan internal, pelatihan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses [7][14]. Sosialisasi yang dilakukan di IPI Garut menegaskan penerjemahan regulasi termasuk mandat UU No. 12/2022 yang disorot Azizi dkk [4] dan mandat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menjadi langkah praktis: siapa penanggung jawab, bagaimana dokumentasi awal yang aman, dan ke mana rujukan dilayangkan. Di Yayasan Pendidikan Islam Assalam Samarang yang membawahi pesantren dan SMKS Assalam pendekatan berbasis kasus nyata mendorong keterbukaan santri dan siswa mengemukakan pengalaman yang sebelumnya tersembunyi. Keterbukaan ini memudahkan fasilitator memetakan area rawan di kelas dan asrama, menegaskan langkah protektif seperti menolak secara asertif, mengenali dewasa tepercaya, dan mengakses layanan bantuan. Praktik ini konsisten tentang kebutuhan prosedur pelaporan spesifik di unit pendidikan keagamaan, sekaligus mengurangi “jarak implementasi” yang kerap ditemukan di banyak lembaga [5][8][15].

Bullying di lingkungan menengah atas muncul sebagai isu sosio-pedagogis yang menuntut strategi menyeluruh mulai dari membangun kesadaran komunitas, diagnosa dini, hingga menumbuhkan sikap intoleran terhadap kekerasan [16]. Di MAS dan SMKS Annida, siswa mengidentifikasi bentuk kekerasan verbal, *gaslighting*, dan tekanan sebaya; melalui *role-play*, mereka mempraktikkan penolakan asertif dan menyusun skema dukungan teman sebaya. Pergeseran dari sekadar tahu menjadi memiliki norma bersama terlihat ketika kelas merumuskan komitmen menolak komentar merendahkan sebagai “candaan” [17]. Sementara itu, di Desa Padaasih, anak-anak SD mampu menyebut contoh kekerasan sederhana melalui cerita dan permainan edukatif, sedangkan guru dan orang tua mendapatkan penguatan tentang hak perlindungan anak dan alur pelaporan lokal. Pola ini mengukuhkan pentingnya kolaborasi berbasis komunitas; kebijakan pencegahan yang disinkronkan dengan partisipasi warga akan memperkuat pengawasan sosial dan respons cepat terhadap kasus [16][18][19].

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan masih tampak: sebagian peserta mengetahui adanya aturan, namun belum yakin pada langkah konkret “bagaimana melapor” dan “siapa yang dihubungi terlebih dahulu”. Untuk itu, di tiap lokasi kami mendorong penyusunan *cheat sheet* lokal berisi kontak penting (BK/asrama, pengurus lembaga, layanan profesional, aparat), prosedur dokumentasi awal yang aman, dan pilihan pendampingan. Inisiatif kecil ini terbukti meningkatkan kepercayaan diri pelapor dan mempersempit celah penegakan kebijakan isu yang banyak ditandai kajian mutakhir [4][5], [20]. Pada saat yang sama, diperlukan pengintegrasian pendidikan seksualitas dalam kanal kurikuler [8].

Ruang digital menambah lapisan tantangan. Ancaman “kekerasan informasi” menuntut literasi digital, etika daring, dan keamanan digital [21]. Pada sesi remaja, *skenario*



cyberbullying, *doxing*, serta penyebaran konten tanpa izin dibahas bersama, diakhiri dengan “tiga langkah aman” *hentikan*, *laporkan*, *buktikan* serta pemetaan kanal bantuan daring. Di tingkat kelembagaan, gagasan pusat informasi anti-kekerasan [22] kami adaptasi sebagai Model Sosialisasi Adaptif yang lahir dari pengabdian ini: konten inti tentang jenis kekerasan, hak dan jalur pelaporan, serta keterampilan protektif; pilihan metode menurut kelompok usia (kuliah interaktif, studi kasus, *role-play*, cerita dan permainan); skrip respon asertif siap pakai; serta bagan rujukan lokal. Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut sudah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai unit independen yang menjadi pusat informasi dan yang menangani pelaporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, namun perlu secara konsisten dilakukan penyebaran informasi dan sosialisasi dalam meningkatkan *awareness* civitas kampus dalam hal kekerasan yang rentan terjadi di tingkat Pendidikan Tinggi juga. Di Assalam, model ini diperkaya komitmen kelas/pondok anti-kekerasan dan pemasangan alur bantuan pada titik strategis; di Annida ia bermuara pada kode etik kelas; dan di Desa Padaasih berubah menjadi panduan ringkas bagi orangtua dan guru.

Keseluruhan pola di atas menguatkan bukti bahwa edukasi damai di lembaga pendidikan berdaya cegah terhadap kekerasan [10], sekaligus menegaskan temuan Safitri dkk. [11] bahwa literasi hukum meningkatkan keberanian pelaporan dan memperluas gagasan satuan pendidikan ramah anak [12], [23]. Mengikuti seruan [24] dan [25] pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi yang menggabungkan pencegahan, mitigasi, dan pembangunan ketangguhan melalui psikoedukasi, kerangka hukum yang operasional, dan jejaring komunitas tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan menggeser sikap dan perilaku kolektif menuju ekosistem sekolah dan pesantren yang aman, inklusif, dan menggembirakan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian ini membuktikan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan yang memadukan psikoedukasi dan literasi hukum efektif di kampus, pesantren, sekolah menengah, dan komunitas desa ketika disesuaikan dengan karakter peserta dan kultur lembaga. Peserta mampu mengenali ragam kekerasan, memahami hak perlindungan anak serta jalur pelaporan, dan mempraktikkan keterampilan protektif; sekaligus lahir model sosialisasi adaptif yang siap direplikasi. Secara teoretis, temuan menegaskan kaitan antara iklim institusi, peran pendidik, dan pelibatan komunitas dalam pencegahan; secara praktis, pengabdian menghasilkan perangkat siap pakai seperti peta rujukan lokal, skrip respon asertif, komitmen kelas/pondok, dan panduan ringkas orang tua juga guru. Ke depan, model ini berpotensi diperluas melalui jejaring lintas lembaga, pembentukan pusat informasi anti-kekerasan, serta evaluasi longitudinal untuk memantau perubahan perilaku dan budaya satuan pendidikan.

Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan materi pencegahan ke kurikulum dan kegiatan rutin (orientasi, pembinaan asrama, layanan BK), menuntaskan SOP pengaduan yang jelas beserta *cheat sheet* kontak rujukan di titik strategis, serta menyelenggarakan pelatihan berkala bagi pendidik, wali asrama, dan pengelola. Pelibatan orang tua, komite, dan tokoh masyarakat penting untuk memastikan pelaporan yang aman, cepat, dan empatik, termasuk pada isu kekerasan digital. Program lanjutan disarankan mengadopsi *training of trainers* bagi guru/ustaz sebagai fasilitator lokal, memantau implementasi komitmen



kelas/pondok, serta memperkuat kerja sama formal dengan P2TP2A, layanan kesehatan, dan aparat. Penelitian berikutnya sebaiknya menilai dampak model secara lebih terukur, mengintegrasikan modul keamanan digital, dan mengkaji pengungkit kebijakan yang mempercepat transformasi budaya aman dan inklusif.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut atas dukungan hibah pengabdian kepada masyarakat melalui nomor kontrak 044/IPI.L3/Kontrak.PkM/VIII/2025, serta seluruh mitra dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

V. REFERENSI

- [1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “Data Kasus Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan melalui SIMFONI-PPA Tahun 2024.” KemenPPPA, Jakarta, 2024.
- [2] N. A. Hamdani and R. N. Khalifah, “The Influence of Risk Perception on Business Model Innovation,” *Int. J. ...*, 2023, [Online]. Available: <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijbesd/article/view/469>.
- [3] A. Mena, “Risks and prevention of school violence: Impact of institutional climate and teacher role,” *J. Inf. Syst. Eng. & Manag.*, vol. 10, no. 3, pp. 506–515, 2025, doi: 10.52783/jisem.v10i3.5382.
- [4] A. A. Azizi, B. F. Anbiya, Y. N. Nisa Apriliyana, N. N. Aprilia, F. R. Rizka Zahro, and M. K. Khoerina, “Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No.12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *JPHM-Widyakarya*, 2024, doi: 10.59581/jphm-widyakarya.v2i2.3343.
- [5] A. Jamaludin, “Sexual Education Policy, Legal Protection From Sexual Violence at University,” *j.civicus*, 2022, doi: 10.17509/civicus.v22i2.51036.
- [6] A. Dahlena and E. Mulyana, “Eksistensi Social Behavior Dalam Pembelajaran IPS Sebagai Penguatan Keterampilan Peserta Didik di Abad-21,” *Soc. Sci. Educ. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 2774–2776, 2021.
- [7] H. Iriawan, K. Krismiyati, S. Handayani, and E. Edyanto, “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus,” *J. Nusantara. Berbakti*, 2024, doi: 10.59024/jnb.v2i3.400.
- [8] A. Jamaludin, “Institutional Approach: Legal Protection Efforts Against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions,” *Khazanah Huk.*, 2025, doi: 10.15575/kh.v7i1.34254.
- [9] M. F. A. Budiarta and M. Sa'id, “Psikoedukasi Asertivitas Untuk Meningkatkan Perilaku Asertif Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Remaja,” *J. KARINOV*, vol. 7, no. 1, p. 40, 2024, doi: 10.17977/um045v7i1p040.
- [10] A. Fiqroh and A. M. Al Muradlo, “Upaya pencegahan tindak kekerasan menggunakan peace education di pondok pesantren,” in *Proceedings of the International Seminar on Islamic Education & Peace*, 2022, vol. 2, pp. 387–395.
- [11] E. Safitri, N. Nurlaela, M. Munasib, and A. M. Hanun, “Peningkatan literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren mahasiswa An Najah Purwokerto,” *Dimasejati J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 120–130, 2024.
- [12] S. Eviningrum, “Sosialisasi pesantren ramah anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di satuan pesantren se-Kabupaten Madiun,” *Abdimas Indones. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 13–18, 2023, doi: 10.59525/aij.v3i2.316.



- [13] M. Z. Mubarak and S. Z. Razali, "Preventing Violence and Extremism in Indonesian Educational Institutions: Policies and Strategies," *Kne Soc. Sci.*, 2022, doi: 10.18502/kss.v7i14.11955.
- [14] D. S. Sukeni and B. S. Prakash, "Sexual Violence in Higher Education, Policies in Indonesia and India," *Justitia J. Huk.*, 2023, doi: 10.30651/justitia.v7i2.20438.
- [15] S. Saan, "The Prevention and Handling of Sexual Violence in Religious Education Units," *J. Surya Kencana Satu Din. Masal. Huk. Dan Keadilan*, 2025, doi: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48179.
- [16] T. П. Сніпина, Т. Л. Лях, and А. ДУЛЯ, "To the Issue of Bullying Prevention in Institutions of Higher Education," *SPTP*, 2024, doi: 10.12958/1817-3764-2024-2-87-92.
- [17] A. Dahlena, M. Soni, N. A. Hamdani, and S. M. Andriani, "Improving MSME HR Competence through Performance Management Training and Effective Recruitment," vol. 6, pp. 8–14, 2025.
- [18] M. Sari, "Community-Based Integrated Child Protection Policy During the Covid-19 Pandemic in Palangka Raya," *Kne Soc. Sci.*, 2023, doi: 10.18502/kss.v8i4.12880.
- [19] P. Sihombing and B. Berlianti, "Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak, Edukasi Kekerasan Perlu Dilakukan Sebagai Pencegahan Dini," *Abdisoshum J. Pengabd. Masy. Bid. Sos. Dan Hum.*, 2024, doi: 10.55123/abdisoshum.v3i1.3086.
- [20] N. A. Hamdani, G. Abdul, F. Maulani, and M. G. Profile, "Entrepreneurial Self-Efficacy , Passion , and Opportunity Recognition in Garut ' s Millennial Coffee Entrepreneurs," vol. 7, no. 2, 2025.
- [21] I. Voitovych, "The Use of Ict in the Prevention of Information Violence in the Educational Environment of Higher Education Institutions," *Mt. Sch. Ukr. Carpaty*, 2025, doi: 10.15330/msuc.2024.31.8-11.
- [22] N. Aida, B. Sukanto, N. A. Perdana, A. S. Fauzah, and G. Y. Annur, "Establishing Anti-Sexual Violence Centers to Promote Safe Educational Environments," *Indones. J. Innov. Stud.*, 2025, doi: 10.21070/ijins.v26i1.1318.
- [23] G. Dewanti, S. Nompembri, W. Widiyanto, A. Hartanto, and A. C. Arianto, "Development of Physical Education Learning Outcomes Assessment Instruments for Volleyball Materials Based on Game Performance Assessment Instrument," *Teoriâ Ta Metod. Fizičnogo Vihovannâ*, vol. 23, no. 2, pp. 170–177, 2023, doi: 10.17309/tmfv.2023.2.03.
- [24] K. U. Noer, T. K. Hendrastiti, L. I. Nurtjahyo, and V. P. Damaiyanti, "Strengthening the Role of Communities in the Prevention of Sexual Violence in Higher Education: Opportunities and Challenges," 2023, doi: 10.2991/978-2-38476-118-0_61.
- [25] M. Arqon *et al.*, "Sexual Violence in the Educational Sector From a Criminological Perspective," *J. Penelit. Inov.*, 2025, doi: 10.54082/jupin.1379.

